

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Irlandia merupakan negara yang terletak di sebelah utara Samudera Atlantik dan berada di seberang Inggris dengan dipisahkan oleh laut Irlandia (*Irish Sea*). Luas wilayah Irlandia sebesar 84,421 km<sup>2</sup> atau setara dengan kota Arkansas di Amerika. Populasi di Irlandia mencapai 4,64 juta jiwa pada tahun 2015. Ibukota Irlandia adalah Dublin, sekaligus sebagai kota terpadat di Irlandia setelah Belfast. Pemerintahan Irlandia berbentuk Demokrasi Parlemerter yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Irlandia juga termasuk dalam anggota Uni Eropa. Negara ini menggunakan 2 bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari, yaitu bahasa Irlandia itu sendiri dan Bahasa Inggris. Ada tiga agama yang dianut oleh masyarakat Irlandia, yaitu Katolik Roma (86,8%), Kristen Protestan (2,7%), dan Islam (0,1%) (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

Irlandia, Sejak berdirinya negara tersebut dalam politik luar negerinya cenderung bersikap netral, misalnya saja pada saat Perang Dunia kedua (Kennedy, 2013). Namun, dalam konflik Israel-Palestina pemerintah Irlandia cenderung tidak bersikap netral dengan sikap yang berseberangan terhadap Israel atau lebih memihak kepada pihak Palestina.

Konflik Israel Palestina dilatarbelakangi pertama kali karena adanya kelompok Yahudi yang berencana untuk mendirikan negara Yahudi yang sekarang dikenal sebagai Israel di tanah Palestina, Hal ini didasarkan pada kitab mereka bahwa tanah Palestina merupakan tempat yang telah dijanjikan sebagai rumah bagi kaum Yahudi. Akhirnya muncul gerakan migrasi ke tanah Palestina oleh orang-orang Yahudi, pada awalnya orang-orang pribumi tidak mengkhawatirkan hal tersebut, Namun lama kelamaan banyaknya kedatangan Yahudi ke Palestina membuat penduduk asli palestina Khawatir. Akhirnya, pertempuran pecah, dengan meningkatnya gelombang kekerasan dan konflik pun semakin berkembang.

Pada tahun 1947 PBB memutuskan untuk campur tangan. PBB merekomendasikan 55% wilayah Palestina dibagikan kepada negara Israel. Padahal bangsa Yahudi hanya mewakili sekitar 30% dari total populasi, dan memiliki tanah di bawah 7%. Tak terima dengan hal itu, negara-negara Arab pun menyerang Israel. Perang tersebut dimulai pada tahun 1947 dan diakhiri pada tahun 1949. Saat itu secara luas dilaporkan bahwa perang dilakukan oleh lima negara Arab, Namun Israel dapat memenangkan pertempuran tersebut (Hidayat, 2012).

Pada akhir perang, Israel telah menaklukkan 78 persen wilayah Palestina, tiga-perempat juta warga Palestina dibuat mengungsi, lebih dari 500 kota dan desa telah dilenyapkan, dan peta baru disusun, di mana setiap kota, sungai dan bukit diberi nama baru, nama Ibrani, hingga semua sisa-sisa budaya Palestina dihapus. Pada tahun 1967, Israel masih berusaha menaklukkan wilayah yang lebih luas.

Setelah Perang Enam Hari dimana pasukan Israel melancarkan serangan kejutan yang sangat sukses di Mesir, Israel menduduki 22% jatah terakhir Palestina yang telah lolos dalam 1948 yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selama Perang Enam Hari tersebut, Israel juga menyerang sebuah kapal Angkatan Laut AS, USS Liberty, membunuh dan melukai lebih dari 200 prajurit Amerika Serikat. Namun, hal tersebut dinyatakan sebagai suatu kecelakaan. Kemudian hingga saat ini perangpun terus terjadi dan hanya menyisakan seperempat wilayah untuk Palestina (Hidayat, 2012).

Banyak bantuan dan dukungan yang diberikan pada Palestina oleh Irlandia yang mengartikan memihak kepada Palestina dalam konflik ini. Misalnya saja, pada tahun 1958 Irlandia menolak untuk mengakui Israel secara resmi karena sejumlah alasan yang “berbau sentimen Irlandia”, ini berdasarkan pada ucapan dirjen senior Israel, Walter Eytan. Baru pada tahun 1963 Irlandia setuju untuk mengakui Israel secara resmi (*de jure*), Namun baru pada Desember 1974, Irlandia membuka kedutaan besar non-residensiil dengan Israel dan sekaligus menjadikan Irlandia sebagai negara Eropa yang paling terakhir mengakui Israel. Pada tahun 1993 Irlandia bahkan menerima kunjungan pemimpin PLO (kelompok pembebasan Palestina) yaitu Yasser Arafat. Dalam keanggotaannya pada Uni Eropa, Irlandia menjadi salah satu negara yang paling bersuara dalam masalah Israel-Palestina. Pada tahun 1973, Irlandia bersama Perancis dan Italia juga memberikan suara dalam perumusan resolusi untuk membolehkan PLO berunding dalam penyelesaian kasus Palestina. Dalam keanggotaan PBB, pada tahun 1959, Irlandia menjadi salah satu negara yang paling konsisten dalam mendanai

program-program kemanusiaan PBB di Palestina (re-tawon.com, 2010, diakses pada 22/09/2015).

Pada tahun 2014, pemerintah Irlandia menggelontorkan dana sebesar 10 juta euro untuk mengembangkan program edukasi di Palestina (Department of Foreign Affair and Trade, 2014). Pada tanggal 16 Februari 2015, Menteri Luar Negeri Irlandia, Charlie Flanagan, pada saat kunjungannya ke Palestina menyatakan bahwa pemerintah Irlandia telah memberikan bantuan dana sebesar 4,7 juta euro pada warga Palestina di Jalur Gaza yang menderita akibat serangan Israel tahun lalu, bantuan ini diberikan melalui salah satu badan PBB yaitu UNRWA (United Nations Relief and Works Agency).

Charlie Flanagan juga menyatakan bahwa bantuan Irlandia melalui UNRWA telah mencapai 48 juta euro sejak tahun 2005. Irlandia juga merupakan pendukung utama UNRWA yang berfokus pada bantuan terhadap Gaza dengan menggelontorkan dana lebih dari 5,6 juta euro untuk bantuan kemanusiaan pada tahun 2006 (Department of Foreign Affair and Trade, 2015). Bantuan Irlandia terhadap Palestina cenderung terus meningkat pada tahun 2005 hingga 2013, namun agak menurun pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan pengalihan pengeluaran anggaran negara dan nilai tukar Dollar-Euro yang agak melemah pada tahun 2015 (estimates for public service 2015, 2015).

Pada tahun 2005, 4,49 juta euro telah di berikan untuk membantu rakyat Palestina dan pada tahun 2013, bantuan meningkat menjadi 10,7 juta euro (Department of Foreign Affair and Trade, 2013). Hal ini jug dinyatakan Menteri

Luar Negeri Irlandia, Charles Flanagan setelah mengadakan kunjungan singkat ke Jalur Gaza (Khudzaifah, 2015). Menurut laporan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Irlandia, pihaknya telah memberikan dana kepada Palestina hingga 89,62 juta euro selama 10 tahun terakhir (Department of Foreign Affair and Trade, 2015). Dukungan lainnya adalah pengiriman kapal ekspedisi kemanusiaan Rachel Corrie ke Palestina pada bulan Juni 2010, dikarenakan tindakan blokade Israel terhadap jalur Gaza. Namun, pengiriman kapal tersebut menuai kontroversi, dikarenakan kapal tersebut di cegat oleh pasukan pertahanan Israel dan menyebabkan sedikit ketegangan antara pemerintah Irlandia dengan pemerintah Israel (Hayes, 2010).

### **Gambar 1.1 Kunjungan Menlu Irlandia Charles Flanagan ke Palestina**



Sumber: (Department of Foreign Affair and Trade, 2015)

Hal yang cukup menarik melihat bahwa jumlah populasi Muslim di Irlandia hanya sekitar 0,5% dari total penduduk Irlandia dan nyaris tidak punya pengaruh penting dalam masyarakat Irlandia. Dengan melihat hal tersebut,

pandangan bahwa masyarakat menaruh simpati yang besar terhadap Palestina karena adanya komunitas yang seagama sangat mudah terbantahkan. Namun yang cukup menarik juga dalam hal ini bahwa sebelum Irlandia berpihak kepada Palestina, Irlandia sempat mendukung negara Israel. Ini dapat dilihat pada awal perjuangan bangsa Israel untuk mendirikan negara sempat didukung oleh Irlandia. Pada awal abad ke-20, banyak pemimpin Irlandia yang simpatik terhadap orang-orang Yahudi, mereka menganggap perjuangan bangsa Israel, termasuk penderitaan mereka, perjuangan mereka untuk merdeka dari Inggris mirip akan penderitaan mereka di masa lalu yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan melawan Inggris. Sehingga, banyak pada saat itu migrasi orang-orang Yahudi yang diterima di Irlandia. Namun seiring dengan kemerdekaan Israel pada tahun 1948, rasa simpati orang-orang Irlandia berubah (Savage, 2013).

Eoghan Harris, salah satu senator Independen Irlandia, mengatakan bahwa setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948 masih banyak orang (khususnya di pemerintahan) yang berpihak kepada negara yang baru terbentuk tersebut. Lalu dalam beberapa tahun kemudian, hampir seluruh kelompok beraliran liberal kiri merubah dukungannya menjadi anti terhadap Israel. (Dowd, 2010) Masyarakat Irlandia sendiri bahkan banyak membentuk NGO yang mendukung Palestina dari pada Israel. Beberapa contohnya seperti Chritian Aid dan Ireland-Palestine Solidarity Campaign (Gold & Gerstenfeld, 2006).

Kemudian bukti dukungan masyarakat Irlandia kepada Palestina diperkuat juga dengan pernyataan Menteri Pembangunan, Promosi Perdagangan dan Hubungan Utara dan Selatan Irlandia yang bernama Seán Sherlock T.D. Ia

mengatakan bahwa “Saya mewakili kemarahan masyarakat Irlandia terhadap penderitaan warga Gaza dan bagian Selatan Israel yang tidak dapat membela diri mereka sendiri. Pemerintah secara konsisten menyerukan agar disepakati sebuah gencatan senjata secara segera, dan Menteri Flanagan (Menteri Luar Negeri Irlandia) telah menyampaikan kepada Duta Besar Israel bahwa Pemerintah Irlandia mengecam adanya pembalasan yang berlebihan terhadap warga Gaza oleh Israel” (Department of Foreign Affairs and Trade, 2014).

Kemudian juga adanya gerakan untuk memboikot produk-produk dari Israel oleh NGO Irlandia yang bernama *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) (Ireland Palestine Solidarity Campaign, 2017). Bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa masyarakat Irlandia membenci Israel atau lebih mendukung Palestina adalah adanya pernyataan Tom Carew dari *Ireland-Israel Friendship League*. Ia mengatakan bahwa “Kedutaan Besar Israel di Dublin adalah yang paling sering didatangi oleh pengunjung rasa, baik itu dari mantan anggota IRA, kelompok elemen Islam, dan beberapa kelompok gereja (Dysch, 2011).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan melihat Latar Belakang diatas maka dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut: Mengapa Irlandia lebih mendukung Palestina dalam konflik Israel Palestina pasca kemerdekaan Israel?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa Irlandia lebih mendukung Palestina dalam konflik Israel Palestina pasca kemerdekaan Israel, padahal sebelumnya Irlandia sempat mendukung Israel dalam pembentukan negaranya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat sosial.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis:**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pembelajaran kepada masyarakat internasional khususnya bagi masyarakat Indonesia mengenai perkembangan konflik Israel Palestina dan kebijakan suatu negara, khususnya Irlandia dalam menangani suatu konflik yang berkepanjangan, yaitu konflik Israel Palestina.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis:**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai kebijakan suatu negara dalam kaitannya terhadap suatu konflik yaitu kebijakan luar negeri Irlandia terhadap konflik Israel Palestina. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pembelajaran mengenai adanya peran suatu kelompok dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan, dasar, dan peninjauan bagi penelitian selanjutnya.



## **1.5. Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Teori Neo-realis**

Pada penelitian ini akan menggunakan Teori Neo-realis yang pada hakikatnya merupakan Teori Hubungan Internasional. Teori Neo-realisme merupakan perkembangan dari Teori Realisme klasik dan pertama kali diperkenalkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1975 dan 1979 sebagai respon atas tantangan yang dikemukakan oleh teori independensi dan sebagai koreksi terhadap pengabaian realisme klasik terhadap kekuatan ekonomi. Neo-realisme disebut juga sebagai “realisme struktural”. Teori ini cenderung meneruskan Teori Realisme klasik yang berpendapat bahwa dalam politik internasional perang dapat terjadi kapan saja (McKeown, 2014).

Dalam wilayah Hubungan Internasional yang lebih tradisional, Kenneth Waltz berusaha memasukkan apa yang ia pandang sebagai disiplin saintifik dan metodologis seperti antropologi dan ekonomi dalam studi politik internasional. Perhatian Waltz terhadap realisme klasik sama dengan keberatannya tentang penilaian kaum liberalis dan Marxis mengenai Hubungan Internasional, yang ia sebut dengan penjelasan ‘kesan kedua’ atau ‘tahap kedua’. Waltz menyanggah teori ‘unit level’ karena mereka mencoba menjelaskan kesemuanya (sistem global) dengan menilai interaksi bagian-bagiannya (ketentuan domestik). Pendekatan ini menunjukkan adanya kaitan antara maksud (tujuan) para pelaku individu seperti negara-bangsa, dan akibat dari tindakan mereka. Apa yang gagal

mereka pahami adalah kondisi struktural yang menjadi bagian dari sistem internasional yang menekankan diri pada semua unit dan yang oleh karenanya sangat menentukan hasil dari interaksi antar negara. Kaum realis, liberalis, dan marxis menurut Waltz salah, karena semuanya mengabaikan pentingnya sistem internasional yang muncul di antara tujuan negara dan dampak interaksi mereka. Waltz percaya bahwa sistem internasional memiliki sebuah struktur yang dapat didefinisikan dengan tiga karakteristik penting, yaitu prinsip tatanan sistem, karakter unit dalam sistem, dan distribusi kemampuan unit dalam sistem (Burchill S, 1996).

Waltz menyatakan bahwa aspirasi moral dari negara-negara yang ada di dunia terhalangi oleh tidak adanya kewenangan untuk mengatur sikap negara yang satu terhadap yang lainnya. Sistem internasional yang anarki membuat sikap kebijakan luar negeri menjadi seragam, dengan cara memperkenalkan negara ke dalam sistem politik kekuasaan. Kebutuhan akan kekuatan strategis dan keamanan menjadi sesuatu yang utama dalam dunia yang tidak aman, dan kebutuhan tersebut akan mengesampingkan tujuan etik negara tanpa mempertimbangkan karakter politik dalam negeri mereka (Burchill S, 1996).

Waltz menyoroti kesamaan sikap kebijakan luar negeri di antara negara-negara yang memiliki tatanan politik yang berbeda-beda, dan menurutnya hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri didorong oleh kebijakan dalam negeri (Burchill S, 1996). Misalnya saja Amerika dengan Uni Soviet pada saat perang dingin, tatanan politik mereka berbeda tetapi

kebijakan luar negerinya cenderung sama yaitu mencari aliansi negara-negara lain. Hal ini dikarenakan kepentingan negaranya yang ingin menyebarkan ideologinya terhadap negara-negara lain dengan cara membangun aliansi.

Prinsip dasar dari Neo-realis berangkat dari pendekatan sistematis dalam mempelajari tingkah laku suatu negara. Ada enam kunci utama dalam konsep Neo-realis, yaitu anarki, struktur, kemampuan, distribusi kekuatan, *polarity*, dan kepentingan nasional. Struktur dan anarki sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Dimana dalam konsep Neo-realis, struktur dari sistem internasional itu adalah anarki. Anarki disini bukanlah yang dimaksudkan sebagai kekacauan atau ketidakteraturan, melainkan disini dimaksudkan adalah tidak adanya pemerintahan dunia atau internasional. Dengan tidak adanya otoritas yang dapat menjangkau secara global dalam keamanan dan stabilitas Hubungan Internasional menyebabkan politik dunia tidak terorganisir secara formal, sehingga sistem internasional dapat dikatakan sebagai sistem yang anarki (Dibek, 2012). Struktur yang anarki memiliki dua implikasi secara umum. Pertama, sistem internasional mengharuskan sebuah negara melakukan '*self help*'. Dengan kata lain, sistem ini menuntut suatu negara untuk dapat bertahan secara mandiri. Kedua, negara akan merasa terancam oleh kemungkinan-kemungkinan diserang oleh yang lainnya, dikarenakan tidak adanya otoritas yang dapat mengatur hal tersebut dan dipatuhi.

Karena setiap negara merasa tidak aman, maka setiap negara membutuhkan ‘kemampuan’ untuk dapat membela dirinya. Kemampuan merupakan instrumen suatu negara untuk bertahan hidup. ‘Kemampuan’ suatu negara dapat dilihat melalui lima kriteria umum, yaitu sumberdaya alam, demografinya, ekonomi, militer, dan kapasitas teknologinya. Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga kemampuan tersebut dapat dikatakan sebagai ‘kemampuan relatif’. Karena setiap negara merasa tidak aman, maka mereka akan berusaha untuk menambah kemampuan mereka masing-masing dan kemudian memunculkan paradoks ‘*security dilemma*’ dalam pencapaian kemampuan tersebut (Dibek, 2012).

Dalam kompetisi keamanan, kemampuan mereka akan didistribusikan kedalam setiap unit, dimana yang perlu diingat bahwa ranking suatu negara ditentukan oleh komponen kemampuan yang telah disebutkan di atas tadi sehingga hal itu harus di distribusikan kedalam setiap unit. Karena kemampuan setiap negara itu relatif maka dibutuhkanlah ‘*polarity*’ agar distribusi kemampuan di setiap unit dapat terpenuhi. *Polarity* dibagi menjadi tiga, yaitu Unipolar, Bipolar, dan Multipolar. Unipolar dapat dilihat dimana hanya terdapat satu negara yang terlihat menonjol secara signifikan, seperti misalnya Amerika yang dapat menguasai militer, ekonomi, dan teknologi secara bersamaan. Bipolar dapat dilihat dengan hanya adanya dua negara yang menonjol seperti contohnya pada perang dingin (Amerika dan Uni Soviet). Multipolar diartikan dengan adanya lebih dari dua negara yang menonjol seperti pasca

perang dingin. Kemudian semua hal yang telah disebutkan di atas dapat diartikan sebagai ‘kepentingan nasional’ yang pada umumnya ditujukan agar negaranya dapat memenuhi kepentingannya dalam keamanan dan ekonomi (Dibek, 2012).

Menurut Waltz, negara mencari kekuasaan dikarenakan sistem internasional yang mengharuskan mereka untuk dapat bertahan hidup secara mandiri (sistem yang anarki) yang disebabkan oleh tidak adanya pemerintahan global yang dapat menjamin keamanan mereka. Oleh karena itu setiap negara akan menerapkan beberapa strategi agar dapat bertahan dalam sistem internasional yang anarki (Heydarian Pashakhanlou, 2009).

Dalam hal ini pada umumnya sikap negara akan memilih untuk melakukan *balancing* atau *bandwagoning*. *Bandwagoning* merupakan strategi suatu negara untuk dapat bertahan dalam sistem yang anarki dengan cara berlingung atau mengekor (*bandwagoning*) kepada negara lain. *Balancing* sendiri dibagi dua, yaitu *external balancing* dan *internal balancing*. *External balancing* sendiri merupakan sebuah usaha suatu negara untuk dapat bertahan dalam sistem yang anarki dengan menggunakan cara yang halus seperti menjalin aliansi dengan negara lain. Sedangkan *internal balancing* merupakan sebuah usaha suatu negara untuk dapat bertahan dalam sistem yang anarki dengan menggunakan cara yang ‘kasar’. Kasar disini diartikan sebagai cara-cara untuk meningkatkan

daya tahan negaranya seperti meningkatkan kekuatan militernya, ekonominya, dan lain sebagainya (Heydarian Pashakhanlou, 2009).

Dalam konflik ini Irlandia berusaha mempertahankan dirinya dengan menggunakan cara *internal balancing*. Dimana Irlandia berusaha memperkuat perekonomian negaranya dengan cara membangun hubungan baik dengan negara-negara Arab sehingga nantinya negara-negara Arab mau melakukan hubungan perdagangan dengan Irlandia dan dari perdagangan ini pada akhirnya akan membuat perekonomian Irlandia naik.

### **1.5.2 Teori Interest Group**

Untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan Teori Interest Group. Teori Interest Group sendiri dicetuskan oleh David Truman. *Interest Group* atau yang juga biasa disebut *Special Interest Group* ialah sejumlah orang atau individu yang memiliki sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan, sesuai dengan namanya, memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah, sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok (Surabakti, 2010).

Tujuan mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah bisa untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau masyarakat (contohnya subsidi pemerintah terhadap petani) atau memajukan tujuan publik yang lebih luas. Untuk mendapatkan tujuan utama mereka, pada umumnya dilakukan

dengan cara melobi pemerintah. *Interest Group* merupakan hasil dari komunitas yang mempunyai kepentingan yang sama yang muncul di tengah-tengah masyarakat. *Interest Group* ada di setiap level pemerintahan (nasional, negara bagian, provinsi, daerah) dan mereka juga dapat memainkan perananan penting dalam urusan luar negeri negara (Thomas, 2014).

Teori Interest Group percaya bahwa banyak kepentingan yang saling berbeda satu sama lain yang bersaing untuk dapat mengendalikan kebijakan pemerintah. Kompetisi diantara kelompok-kelompok tersebut dalam mewujudkan kepentingannya tersebut dapat membantu dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah mempunyai peranan aktif dalam menentukan sikap dari kelompok-kelompok kepentingan. Dimana, kelompok yang merasa terancam kepentingannya akan segera melakukan tindakan kepada pemerintah agar kepentingannya terpenuhi. Kelompok kepentingan bisa dipolitisasi dan bisa juga menjadi bagian dari institusi pemerintah. Posisi kelompok kepentingan di masyarakat dan karakteristik internalnya dapat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan (Truman, 1951).

Kelompok kepentingan sendiri sangat lazim di Amerika atau negara-negara demokrasi. Kelompok kepentingan sendiri sangat mempengaruhi Amerika dalam pengambilan kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Struktur politik pemerintah Amerika

(Federalisme, Kebebasan, dan Hak) mengizinkan kelompok kepentingan yang potensial untuk muncul dan pada akhirnya memainkan peranan yang dapat mewakili kepentingannya.

Di Irlandia sendiri terdapat 2 kelompok besar yang saling berseteru satu sama lain, yaitu Unionist dan Nationalist. 2 kelompok besar ini memegang peranan penting dalam pengambilan kebijakan bagi Republik Irlandia sendiri maupun Irlandia Utara. Bagi kelompok Nationalist, suara mereka diwakili oleh Sinn Féinn atau partai Nasionalis (*Nationalist Party*) dan sebagian besar pendukungnya adalah warga Irlandia sendiri, pendukung Nationalist sendiri juga ada di Irlandia Utara tetapi jumlahnya sedikit. Sedangkan Unionist diwakili oleh partai Ulster (*Ulster Party*) yang sebagian besar pendukungnya berada di Irlandia Utara, pendukung Unionist sendiri juga berada di wilayah Republik Irlandia tetapi mereka merupakan kaum minoritas di wilayah tersebut.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini berdasarkan pada tema dan topik yang dibahas yang berupa suatu kebijakan dalam sebuah kasus atau konflik. Adapun pembahasan terfokus kepada peristiwa secara interaktif dengan pembahasan yang dibatasi sampai periode tahun 2015, serta analisis dan deskripsi yang berdasarkan kepada fakta dan data.



### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang digunakan untuk memberikan penjelasan dalam suatu fenomena. Penelitian ini bersifat eksplanatif dikarenakan penulis berusaha untuk menjelaskan mengapa Irlandia lebih memilih mendukung Palestina dibandingkan Israel dalam konflik Israel Palestina pasca kemerdekaan Israel yang hingga sekarang konflik ini belum menemui titik terang.

### **1.6.2 Definisi Konseptual**

#### **1.6.2.a Kebijakan Luar Negeri**

Merupakan tujuan umum yang menuntun aktivitas dan hubungan satu negara dengan negara lainnya. Perkembangan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kepentingan domestik, kebijakan atau tingkah laku negara lain, atau rencana untuk mencapai desain geopolitik tertentu (Cunningham, 2015). Menurut George Modelski, kebijakan luar negeri merupakan sebuah sistem aktivitas yang berkembang yang diciptakan oleh sekelompok orang (pemerintah) untuk mengubah tingkah laku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas mereka terhadap lingkungan internasional. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah untuk mengurangi aksi-aksi yang dapat merugikan negara lainnya dan memaksimalkan kerjasama antar negara (Mushtaq, 2013).

### **1.6.3 Definisi Operasional**

#### **1.6.3.a Kebijakan Luar Negeri**

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dalam Kebijakan Luar Negeri yaitu:

a). Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan yang dimaksud adalah bantuan dan tindakan untuk menyelamatkan jiwa dengan cara mengirim obat-obatan, makanan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

b). Bantuan Dana

Bantuan dana yaitu melakukan sebuah pendanaan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan para korban dan memastikan agar kebutuhannya terus terjamin.

c). Bantuan Pasukan Perdamaian

Bantuan pasukan perdamaian yaitu ikut andil dalam menerjunkan pasukan dalam suatu konflik guna menciptakan keamanan bagi masyarakat sipil dan menciptakan perdamaian bagi kedua belah pihak. Bantuan pasukan perdamain ini pada umumnya atas mandat dari PBB dan pasukan ini berasal dari berbagai negara.

#### **1.6.4 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian digunakan untuk membatasi analisis. Dalam penelitian ini, Penulis membatasi analisis terkait Kebijakan Luar Negeri Irlandia terhadap konflik Israel Palestina sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penyajian data akan dilakukan dengan beberapa metode yaitu berupa :

##### **1. Data Primer : Wawancara**

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, penulis akan melakukan wawancara dengan ahli bidang kebijakan luar negeri Irlandia di Timur Tengah. Data-data tersebut nantinya akan menjadi data pendukung dalam penulisan penelitian ini.

##### **2. Data Sekunder : Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya berdasarkan literatur tersebut. Literatur tersebut dapat berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

### 1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Miles, Huberman, & Saldana, 2013).

Reduksi data (*data condensation*) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak disaat penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang akan dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, mengangkat tema, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses transformasi data ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Miles, Huberman, & Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 2013).

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data (*data display*). Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian/*display*” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-

penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis lebih jauh atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian tersebut (Miles, Huberman, & Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 2013).

Dalam pelaksanaan penelitian, Miles dan Huberman yakin bahwa penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menarik kesimpulan atukah terus melakukan analisis.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Miles, Huberman, & Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 2013).